

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang telah dilakukan oleh peneliti dan dianalisa pada bab III, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dalam Perencanaan Dumisake dengan menggunakan teori Evaluasi Kinerja oleh Peter. F. Drucker masih harus ditingkatkan dan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal tersebut karena masih banyaknya indikator yang belum dapat di capai dengan baik berdasarkan teori yang digunakan.

1. Pada aspek efektivitas, kinerja Bappeda Provinsi Jambi dalam menetapkan sasaran pada program dumisake masih memiliki kekurangan yakni pada perumusan sasaran untuk beberapa program tidak disertai dengan target numerik yang jelas di dalam RPJMD seperti, akses internet, bantuan operasional lembaga adat, dan program Jambi Responsif. Sehingga menyulitkan penentuan parameter keberhasilan dan penyesuaian dengan kebutuhan lapangan. Disisi lain pada pencapaian target, realisasi di beberapa program menunjukkan pencapaian yang melampaui angka perencanaan administratif namun adanya ketidaksesuaian antara target dan realisasi juga teridentifikasi, terutama disebabkan oleh sistem pendataan administratif yang kaku dan mekanisme verifikasi yang berlapis. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara perencanaan teoretis dengan kondisi

aktual di lapangan, serta menghambat evaluasi yang objektif terhadap efektivitas program.

2. Pada aspek efisiensi, kinerja Bappeda Provinsi Jambi menunjukkan keunggulan pada aspek pengelolaan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi. Pendekatan integratif yang melibatkan SDM internal beserta OPD terkait telah menghasilkan perencanaan yang komprehensif dan selaras dengan tujuan strategis pembangunan daerah. Selain itu, pemanfaatan sistem SPID dalam pendataan dan pelaporan mendukung transparansi serta akuntabilitas proses perencanaan. Namun, dari aspek finansial, ketertutupan data anggaran mencerminkan kurangnya transparansi yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketidaktersediaan informasi ini berisiko menghambat pengawasan publik, menurunkan efisiensi perencanaan, serta meningkatkan potensi inefisiensi dalam pengelolaan dana.
3. Pada aspek responsivitas, kinerja Bappeda Provinsi Jambi menunjukkan adanya keterbatasan dalam daya tanggap dan fleksibilitas perencanaan. Meskipun mekanisme Musrenbang telah digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, birokrasi yang kaku serta ketergantungan pada data dari OPD menyebabkan respons terhadap perubahan sosial menjadi lambat. Selain itu pada sistem perencanaan yang diterapkan mengikuti siklus Emin 1 mengakibatkan penyesuaian kebijakan baru hanya dapat dilakukan pada siklus perencanaan berikutnya. Proses penyampaian

aspirasi yang bersifat hierarkis, mulai dari tingkat desa hingga provinsi menghambat respons cepat terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang bersifat mendesak.

4. Aspek akuntabilitas, kinerja Bappeda Provinsi Jambi dalam perencanaan Program Dumisake tercermin dalam mekanisme monitoring triwulanan dan penggunaan SIPD sebagai instrumen pertanggungjawaban yang melibatkan seluruh OPD terkait, sehingga setiap capaian kegiatan dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan rutin dan dokumentasi pendukung seperti foto kegiatan. Namun, SIPD sebagai aplikasi yang memfasilitasi pencatatan kegiatan secara digital memiliki keterbatasan akses publik terhadap informasi program, sehingga membuat transparansi ini hanya bersifat internal tanpa mekanisme kontrol independen berisiko menurunkan kredibilitas pengelolaan program.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BAPPEDA Provinsi Jambi dalam Program Dumisake belum optimal, khususnya dalam aspek partisipasi perencanaan. Secara nyata, pihak kecamatan tidak dilibatkan dalam tahapan perencanaan dan evaluasi lima program utama gubernur dan wakil gubernur terpilih, yakni Jambi Cerdas, Jambi Sehat, Jambi Tangguh, Jambi Responsif, dan Jambi Agamis. Hal ini menunjukkan lemahnya pendekatan partisipatif dan desentralisasi fungsional dalam tata kelola pembangunan daerah.
6. Selain itu, Dumisake cenderung hanya menjadi tagline politik tanpa dasar konseptual dan perencanaan yang terukur. Ketiadaan indikator kinerja

yang jelas serta ketidaksinkronan antara dokumen RPJMD dan pelaksanaan di lapangan memperkuat asumsi bahwa program ini belum dikelola secara akuntabel. Dalam konteks ilmu pemerintahan, hal ini mencerminkan lemahnya peran BAPPEDA sebagai institusi perencana yang seharusnya responsif dan mampu menerjemahkan visi kepala daerah ke dalam kebijakan pembangunan yang inklusif dan tepat sasaran.

4.2 Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian yang dilakukan penulis bermaksud memberikan saran pada Kinerja BAPPEDA sebagai leading sector dalam perencanaan pembangunan daerah yang harus terus dievaluasi agar mampu menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta transparan dalam terakit informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, beberapa saran diajukan guna memperbaiki proses perencanaan Program Dumisake agar dapat lebih optimal dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi:

1. Bappeda Provinsi Jambi perlu memperhatikan penyusunan sasaran lebih akurat dengan menetapkan target numerik yang jelas untuk setiap program agar indikator pencapaian dapat diukur secara objektif dan memudahkan dalam pelaksanaan program di lapangan secara akurat.
2. Bappeda Provinsi Jambi perlu mengadopsi prinsip perencanaan dinamis yang memungkinkan penyesuaian kebijakan secara lebih cepat pendekatan ini dapat diperkuat dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui

forum konsultasi yang terdesentralisasi, sehingga aspirasi publik dapat segera diakomodasi dalam perencanaan program.

3. Bappeda Provinsi Jambi perlu memberikan dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi kecamatan dalam setiap tahapan Program Dumisake, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan kecamatan sangat penting karena merupakan struktur pemerintahan terdekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan lokal secara lebih konkret. Dari segi nomenklatur, "Dua Miliar Satu Kecamatan" seharusnya menjadikan kecamatan sebagai subjek utama, bukan hanya penerima kebijakan. Pelibatan aktif kecamatan akan memperkuat prinsip partisipatif, dan efektivitas dalam perencanaan pembangunan daerah. Penguatan peran kecamatan juga akan mendorong implementasi kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran sesuai dinamika sosial di lapangan.